



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2027

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

KATAPENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Tahun 2027 dapat diselesaikan. Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2027 adalah suatu Dokumen Perencanaan yang bersifat sistematis, taktis dan strategis serta berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2027 merupakan rumusan pernyataan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (RENJA) pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi selama 1 tahun kedepan. Kami berharap penyusunan Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2027 dapat dijadikan acuan dalam menentukan program dan kegiatan di DPMPTSP, serta menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kinerja bagi para pegawai DPMPTSP didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kami mengakui dan menyadari bahwa Laporan Penyusunan Renja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan pemikiran. Untuk itu diharapkan sumbang saran dan pendapat yang bersifat membangun demi sempurnanya Penyusunan Renja ini.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran hingga tersusunnya laporan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi ini.

Bekasi, 7 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



Drs. H. JAQHARUL ALAM, ME
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19681103.199003.1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 8

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 8

 Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Bekasi 10

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 19

 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Satu Pintu Kabupaten Bekasi 20

 Penanaman Modal 24

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH 26

 Tabel 2.3 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat
 Daerah Tahun 2027..... 30

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 32

 Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Kabupaten Bekasi 33

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 43

 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
 2027 Kabupaten Bekasi..... 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 44

 3.1.1 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap Pelaksanaan Program
 Strategis Nasional (PRO-SN) Tahun 2027 44

 Tabel 3.1 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap Pelaksanaan Program
 Strategis Nasional (PRO-SN) Tahun 2027 44

 3.1.2 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Prioritas
 Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 45

 Tabel 3.2 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Prioritas
 Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 45

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 47

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....47

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....49

Tabel 3.4 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....50

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Bekasi.....54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 72

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 72

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2027 73

4.2 DAFTAR HIBAH DAN BANSOS PERANGKAT DAERAH TAHUN 202789

TABEL 4.2 Daftar Hibah Dan Bansos Perangkat Daerah Tahun 202789

BAB V PENUTUP90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kabupaten Bekasi..... 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi 20

Tabel 2.3 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minial (SPM) Pada Perangkat Daerah Tahun 2027..... 30

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Bekasi.....31

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027. 43

Tabel 3.1 Dukungan Program/Kegiatan/Subkegiatan Terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2027. 44

Tabel 3.2 Dukungan Program/Kegiatan/Subkegiatan Terhadap Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. 45

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah47

Tabel 3.4 Dukungan Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Strategis Bupati Tahun 2027 50

Tabel 3.5 Perumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan untuk Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028.54

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027..... 73

Tabel 4.2 Daftar Hibah dan Bansos Perangkat Daerah Tahun 2027 89

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Tahun 2027. Bab ini menjelaskan kedudukan Renja-PD sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran Renstra-PD serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, diuraikan landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja-PD, serta sistematika penulisan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

1.1 LATAR BELAKANG

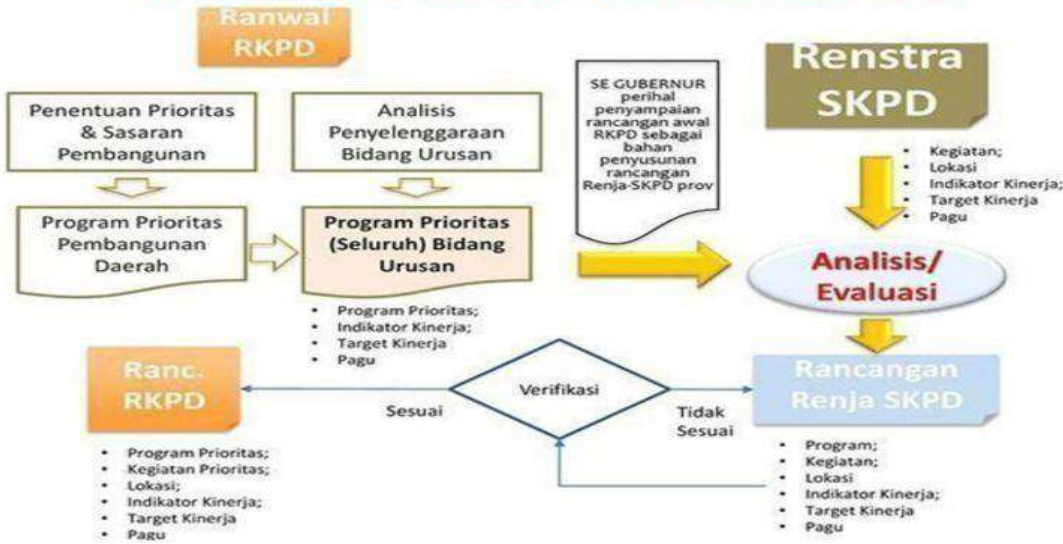
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Penyusunan Renja-PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Renja-PD sebagai instrumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Renja-PD berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) ke dalam rencana kerja tahunan yang terukur dan implementatif.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, serta RKPD. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa proses penyusunan Renja-PD dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap persiapan penyusunan Renja-PD, yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja-PD, orientasi penyusunan Renja-PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;
2. Tahap penyusunan rancangan Renja-PD; dan
3. Tahap penetapan Renja-PD.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja-PD, DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Renja DPMPTSP dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus pada pengkajian kondisi eksisting DPMPTSP, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Bagan Alur penyusunan Renja PD dapat dilihat pada Gambar berikut :

PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD



Gambar 1. 1 Baglan Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja DPMPTSP disusun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat program dan kegiatan di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Program dan kegiatan yang direncanakan disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP, serta diselaraskan dengan sasaran dan indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Dengan demikian, Renja DPMPTSP diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dan terarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta mampu mendorong peningkatan iklim investasi, kualitas pelayanan perizinan, dan kontribusi sektor penanaman modal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pemetaan Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran dan Indikator Sasaran DPMPTS Kabupaten Bekasi dapat digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dengan DPMPTSP

Tujuan daerah	Indikator tujuan daerah	Sasaran daerah	Indikator sasaran daerah	Sasaran perangkat daerah	Indikator sasaran perangkat daerah	Perangkat daerah
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah yang tangguh dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	DPMPTSP

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 dan), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
10. Undang-undang (UU) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah peraturan yang mengatur perubahan ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Peringkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045;

- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029;
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
- 40. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027;
- 41. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
- 42. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- 43. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) Tahun 2027 adalah untuk menggambarkan arah kebijakan serta pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1. Menjadi dokumen perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan DPMPTSP yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027;
- 2. Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran aparatur DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Bekasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	Mengemukakan pengertian singkat tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, serta keterkaitan Renja-PD dengan RKPD, Renstra-PD, Renja K/L, Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan keterkaitannya dengan penyusunan RAPBD.
	1.2 Landasan Hukum	Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan,

		kedudukan, SOTK DPMPTSP, serta pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
	1.3 Maksud dan Tujuan	Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2026.
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dan susunan garis besar isi dokumen Renja DPMPTSP.
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun sebelumnya serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (Tahun 2026) yang dikaitkan dengan target Renstra DPMPTSP.
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Analisis capaian kinerja pelayanan DPMPTSP berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, keterkaitan dengan SPM dan SDGs, serta tantangan dan peluang peningkatan pelayanan.
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Uraian proses perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DPMPTSP, alasan pelaksanaan review, serta temuan dan catatan penting hasil review.
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Uraian Mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditunjukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari hasil penelitian lapangan .
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGITAN	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.1.1 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PRO-SN) Tahun 2027 3.1.2 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Prioritas	Telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

	Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027	
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
	3.3 Program dan Kegiatan	Bagian ini memuat arah peran dan kontribusi DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta gambaran usulan program dan kegiatan pada Rancangan Awal Renja yang disusun berdasarkan rumusan program dan kegiatan, sasaran pembangunan daerah dan program prioritas bupati tahun 2027, rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan dan penjelasan jika rumusan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027	Penjelasan faktor pertimbangan perumusan program dan kegiatan, rekapitulasi jumlah program dan kegiatan, sebaran lokasi, serta tabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan.
	4.2 Daftar Hibah dan Bansos Perangkat Daerah Tahun 2027	Penjelasan Data Rekapitulasi Hibah dan Bansos pada perangkat daerah di tahun 2027.
BAB V	PENUTUP	Kesimpulan dan penegasan komitmen DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) tahun sebelumnya serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan yang dikaitkan dengan target Rencana Strategis DPMPTSP. Selain itu, disajikan analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD sebagai dasar perumusan program dan kegiatan pada tahun perencanaan berikutnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya, perlu dilakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renja DPMPTSP) tahun lalu (tahun n-2) yaitu Tahun 2025, serta perkiraan capaian kinerja tahun

berjalan (tahun n-1) yaitu Tahun 2026, dengan mengacu pada APBD Tahun 2026 yang pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah telah ditetapkan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini meliputi:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan realisasi Renstra DPMPTSP tersebut mengacu pada laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD, yang selanjutnya disajikan dalam tabel evaluasi sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

TABEL 2. 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2026
KABUPATEN BEKASI

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)	TargetKinerjadan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggu jawab	Ket					
								I		II		III		IV				13				14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																				44,17	20,51		
		2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			60,15	21,52	DPMPPTS P	
				MeningkatnyaKualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	0		0		0							0		0				100	0		
		2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-											58,33	5,58		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			0	0		
		2.18.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								-											50	15,16		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah (Dokumen)	6		0		0		2		3			3		3				50	0		
		2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-		-				-					66,67	0,8		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		0		0		0		2			2		2				66,67	0		
		2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			35,53	21,01		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah																			0	0		
		2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			6,59	21,1		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	91		0		91		3		6			6		6				6,59	0		

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penangg ungjawa b	Ket			
										I		II		III		IV				K	Rp			K	%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.18.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								-		-						-			100	1,95		
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		1				1		1		100	0			
		2.18.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-					-		-					-		-	0	0			
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	18		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								-										86,62	21,52			
				Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah																		0	0			
		2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-		-					-			0	46,35			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Paket)	44		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-					-										14,71	1,99			
				TersedianyaPeralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	34		0		0		0		5				5		5		14,71	0			
		2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-										125	17,19			
				TersedianyaBahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		0		0		0		10				10		10		125	0			
		2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-										300	32,9			
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12		0		0		0		36				36		36		300	0			
		2.18.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu								-		-					-			0	1,56			

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				TerlaksananyaFasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasKunjungan Tamu (Laporan)	12		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-										166,67	19,58			
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD (Laporan)	12		0		0		3		20				20		20		166,67	0			
		2.18.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								-		-				-				0	19,8			
				Terlaksananya PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-		-				-				0	23,38			
				Kebutuhan Saranadan Prasarana Terpenuhi																		0	0			
		2.18.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		-				-				0	51,56			
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		-				-				0	10,64			
				TersedianyaSaranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		50	26,2			
				Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Air, Listrik dan Komunikasi Terpenuhi																		0	0			
		2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-										50	7,25			
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		6				6		6		50	0			
		2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		50	32,01			

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penangggungjawab	Ket			
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantoryangDisediakan (Laporan)	12		0		12		3		6					6		6			50	0		
		2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-						-										92,86	0			
				BarangMilik Daerah Berfungsi Baik																			0	0			
		2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-						-										0	0			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		0		0		0				0		0			0	0			
		2.18.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-						-										92,86	0			
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	70		0		0		0		65				65		65			92,86	0			
		2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									-										25	3,24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Meningkatnyakemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0		0		0		0		1				1		1			0	0			
		2.18.02.2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-					-										50	4,42			
				Kebijakan Insentif PenanamanModal Diterapkan																			0	0			
		2.18.02.2.01.0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				-					-										100	8,83			

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAS/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
									I		II		III		IV				K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah/dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenanaman Modal (Dokumen)	1		0		0		0		1					1		1		100	0		
		2.18.02.2.01.0003		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				-				-		-					-		-	0	0			
				TerlaksananyaKemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan KemitraanantaraUsaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								-		-				-		-	0	2,87				
				Meningkatnya Pemanfaatan Peta Potensi Investasi																	0	0				
		2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-				-		-				-		-	0	0				
				Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								-		-				-		-	0	3,74				
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				-				-		-				-		-	0	0			Dinas Penanam anModal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu	
				Meningkatnya jangkauan promosipenanaman modal	PersentasePeningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0		0		0		0		0				0		0		0	0			
		2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-				-		-				-		-	0	0				

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket					
								I		II		III		IV				K	Rp			K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
				Meningkatnya PenyelenggaraanPromosi Investasi																	0	0				
		2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-					-					-			-	0	0			
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0			0		0		0	0				
		2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									-					-				0	14,77	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu		
				Meningkatnyaperizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	0		0		0		0		0			0		0		0	0				
		2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									-					-				0	14,77			
				Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Memenuhi Standart																		0	0			
		2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									-					-				0	14,77			
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha BerbasisRisiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan BerusahamelaluiSistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	340		0		0		0		0			0		0		0	0				
		2.18.05		PROGRAMPENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									-									6,67	5,97	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu		

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penangg ungjawa b	Ket					
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																								Satu Pintu		
				Terkendalinyapelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0		0		0		0		01				1		1		0	0			
		2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								-									6,67	5,97				
				Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal Yang Dihadapi Pelaku Usaha																	0	0				
		2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								-		-				-			0	0,34				
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yangdihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	4		0		0		0		0			0		0		0	0				
		2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								-		-				-			0	7,31				
				TerlaksananyaBimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ SosialisasiImplementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	240		0		0		0		0			0		0		0	0				
		2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal								-									20	10,07				

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2029 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD TahunLalu(Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRAs/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penang gawa b	Ket	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				TerlaksananyaAnalisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaa n Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha(Kegiatan Usaha)	70		0		0		5		14				14		14		20	0			
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									-									50	28,57	Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu			
			Meningkatnya pemanfaatandaninformasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Datadan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0		0		0		0		5					5		5		0	0			
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-									50	28,57				
			Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Penanaman Modal																		0	0				
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									-									50	28,57				
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan BerbasisSistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	10		0		0		0		5					5		5		50	0			
																					0	0				
			JUMLAH																							

Berdasarkan hasil analisis terhadap data kinerja dan realisasi anggaran yang disajikan pada Tabel 2.1, Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sampai dengan pertengahan Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sejumlah data dikelompokkan ke dalam beberapa capaian yang ada dibawah ini:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.18.01.2.07.0010): Realisasi Anggaran dan Fisik hingga Triwulan II Tahun 2026 masih tercatat 0% dari target pagu berjalan sebesar Rp.360.000.000,00 (target 4 unit sarpras). Hal ini disebabkan mekanisme pengadaan modal barang milik daerah penunjang operasional kantor memerlukan proses perencanaan dan penyusunan spesifikasi belanja modal yang akan dialokasikan pada Triwulan III.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.18.01.2.07.0011): Realisasi Anggaran dan Fisik hingga Triwulan II Tahun 2026 masih tercatat 0% dari target pagu berjalan sebesar Rp.3.130.000,00. Hal ini disebabkan mekanisme pengadaan modal barang milik daerah penunjang operasional kantor memerlukan proses perencanaan dan penyusunan spesifikasi belanja modal yang akan dialokasikan pada Triwulan IV.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (2.18.01.2.02.0005): Realiasi Anggaran masih tercatat 0% dari target Anggaran Rp.1.080.000,00 karena sub-kegiatan ini hanya dilaksanakan pada akhir tahun anggaran untuk penutupan siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tahunan Perangkat Daerah.
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.18.01.2.02.0001): Terserap secara proposional sebesar 21,1% untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN 91 orang/bulan pada Triwulan II Tahun 2026.
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.18.01.2.08): Layanan jasa komunikasi, air, listrik dan jasa pelayanan umum kantor capaian fisik berjalan pada kisaran 26,2% s.d 32,01%.
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (2.18.01.2.06.0010): Target Kinerja sebesar 19,8% (1 Dokumen).
7. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (2.18.04.2.01.0006): Realiasi Anggaran dan Fisik hingga Triwulan II Tahun 2026 masih tercatat 0% dari target pagu berjalan sebesar Rp.124.394.030,00. Hal ini disebabkan mekanisme pengadaan memerlukan proses perencanaan dan penyusunan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.
8. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (2.18.05.2.01.0005): Target Kinerja (240 pelaku usaha) dengan pagu berjalan Rp.42.644.000,00. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dilaksanakan secara daring.
9. Pengawasan Penanaman Modal (2.18.05.2.01.0006): Terserap secara proposional pada Triwulan I sebesar 10,07% (70 Kegiatan Usaha) dari target pagu berjalan Rp.53.524.000,00.

Secara keseluruhan, capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026 Mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan sesuai rencana pada kegiatan dari semester pertama. Sementara itu, ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi perlu menjadi bahan perhatian pada semester selanjutnya melalui percepatan pelaksanaan, penguatan koordinasi antar bidang terkait dan pemanfaatan anggaran Renja Tahun 2026 serta sasaran Renstra dapat tercapai secara maksimal.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang mencerminkan pelaksanaan tugas, peran, dan fungsi perangkat daerah. Indikator ini digunakan sebagai dasar utama dalam menilai capaian kinerja DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Sebagai bagian dari penilaian kinerja, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari indikator-indikator strategis dan paling merepresentasikan kinerja organisasi. Capaian IKU diharapkan mampu memberikan gambaran yang proporsional mengenai tingkat keberhasilan DPMPTSP dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP menggambarkan outcome dari program-program utama yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bekasi. Indikator tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha, Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP senantiasa dilakukan peninjauan dan penyempurnaan agar tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan kinerja organisasi diharapkan dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Bekasi. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL 2. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

NO	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	IKU: Meningkatnya Investasi	Presentas e Peningkat an Nilai Realisasi Investasi	-	1%	1%	1%	17,35%	13,93%	1%	1%	-
2			indikator program 1: realisasi total terhadap target investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3			Indikator program 2: presentase peningkatan investor yang berinvestasi	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

RENCANA KERJADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2027

NO	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4			indikator program 3: presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5			indikator program 4: presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			IKK LPPD 1 : presentase peningkatan investasi di kabupaten/kot a	1%	1%	1%	17,35%	13,93%	1%	1%	Meskipun realisasi investasi meningkat tetapi persentase peningkata n investasi (laju pertumbuh an) sudah mengalami penurunan dikarenaka n lebih banyak industri eksisting dibandingk an dengan

NO	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											industri baru
			IKK LPPD 2 : Realisasi total terhadap target investasi	112,88%	-	-	110,68%	112,88%	-	-	

Sumber : DPMPTSP, 2026

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi menunjukkan hasil tren yang positif, terutama pada Target Investasi.

Penanaman Modal

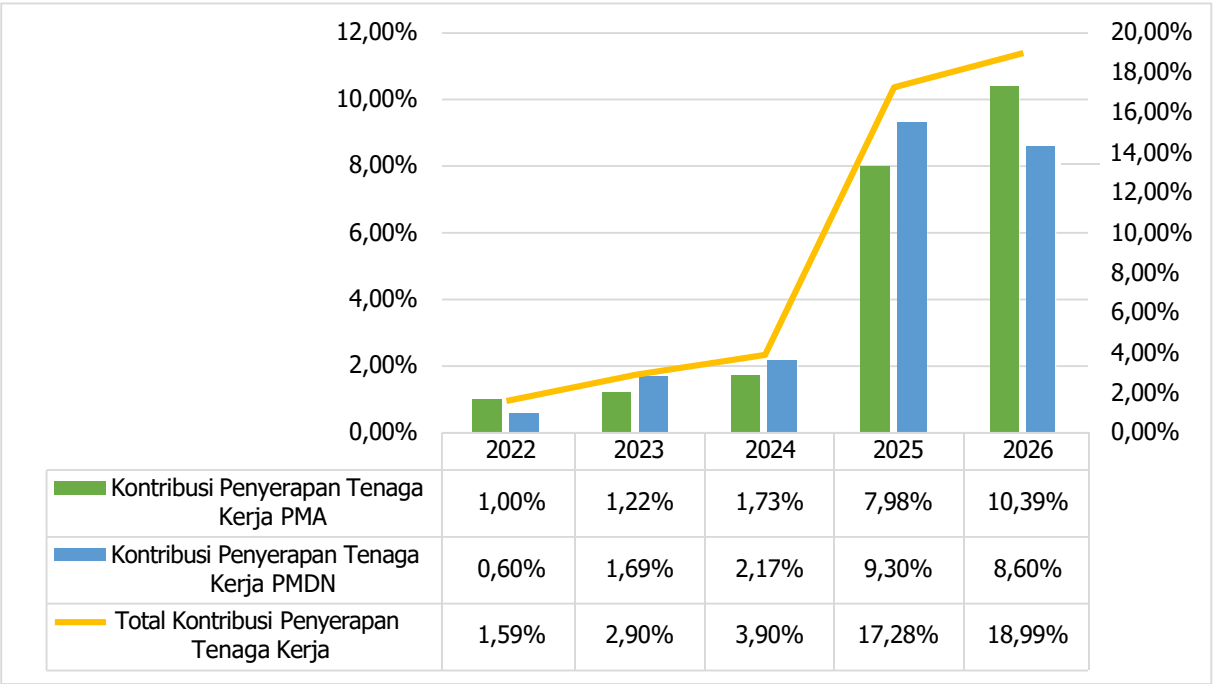
Terkait penanaman modal daerah, capaian realisasi dan investasi dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat di tahun 2023 sebesar Rp. 40.463.289.393.110,- kembali meningkat di tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar Rp. 50.622.479.551.545,-. dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi sebesar Rp.49.668.585.807.875,-. Sedangkan pada penanaman modal dalam negeri (PMDN), sebagaimana pada tahun 2024 yang bernilai sebesar Rp.21.210.882.535.507,-. kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp.32.171.775.973.926,-. Penyerapan tenaga kerja akibat adanya investasi ini justru mengalami kenaikan dari 28.011 orang di tahun 2024 menjadi 36.527 orang di tahun 2025. Selanjutnya pada PDMN, penyerapan terhadap tenaga kerja juga ikut meningkat yang dimana pada tahun 2024 jumlah penyerapan tenaga kerja PMDN berjumlah 35.137 orang dan pada tahun 2025 menjadi 36.527 orang. Berkaitan dengan hal itu menunjukkan bahwa baik nilai PMDN maupun PMA berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini.

Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri serta Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2026

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penanaman Modal Asing/ PMA (Juta Rupiah)	29.148.981	40.463.289	50.622.479	49.668.585	35.107.525
2	Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (Juta Rupiah)	17.880.345	20.748.018	21.210.883	32.171.776	9.631.963
3	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	20.002	19.367	28.011	36.527	25.656
4	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	11.942	26.850	35.137	42.599	21.228
5	Angkatan Kerja (Orang)	2.006.507	1.592.879	1.619.896	457.855	246.887

Sumber: <https://dpmptsp.jabarpov.go.id/realisasiinvestasi/>

Selama tahun 2022-2026, total kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi masih sangat rendah dengan rentang di antara 1-3%. Meski rendah, kontribusi PMA maupun PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja meningkat positif dengan penyerapan tenaga kerja oleh PMA bertambah dari 1,00% pada tahun 2022 menjadi 10,39% di tahun 2026, dan untuk PMDN dari 0,60% pada tahun 2022 menjadi 8,60% di tahun 2026. Dari hasil keseluruhan tersebut didapatkan bahwa total kontribusi penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana pada tahun 2022 sebesar 1,59% menjadi 18,99% di tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Kontribusi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2026

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi Periode Januari – Juni 2026. Total realisasi investasi, jumlah proyek dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Juni 2026, mencapai Rp.44.739.488.660.887,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Sektor	Jumlah Proyek	Ratio Penyerapan Tenaga Kerja(%)
1	Perdagangan dan Reparasi	8.346	32,06%
2	Industri Logam, Mesin dan Elektronika	2.863	11,00%
3	Konstruksi	3.063	11,76%
4	Jasa Lainnya	2.095	8,05%
5	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.339	5,14%

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode Januari – Juni 2026

Realisasi peringkat negara menurut PMA dan PMDN di Kabupaten Bekasi periode pelaporan Januari – Juni 2026 berdasarkan negara. Negara dengan investasi paling besar pada periode Januari – Juni 2026 yaitu negara Amerika Serikat dengan total investasi sebesar Rp. 9.656.035.373.111,- (21,58%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Negara	Investasi	Ratio (%)
1	Indonesia	9.631.963.060.216	21,53%
2	Jepang	5.073.886.586.628	11,34%
3	Singapura	8.010.931.662.011	17,91%
4	Amerika Serikat	9.656.035.373.111	21,58%
5	Korea Selatan	1.490.360.652.013	3,33%

Sumber : Laporan Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode Januari – Juni 2026

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Tingkat pelayanan perangkat daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan telah diarahkan pada prinsip pelayanan terpadu, pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses perizinan, serta peningkatan kemudahan berusaha. Digitalisasi pelayanan menjadi aspek penting karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi secara tatap muka, meningkatkan keterlacakan permohonan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh informasi serta mengajukan permohonan pelayanan.

Namun masih terdapat hal kritis yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah. Salah satu persoalan utama adalah konsistensi dan kepastian waktu pelayanan. Meskipun standar pelayanan telah ditetapkan, tetapi pelaksanaan di lapangan dapat menghadapi kendala apabila proses penerbitan perizinan memerlukan verifikasi atau rekomendasi dari perangkat daerah teknis lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih panjang dan dapat menimbulkan persepsi bahwa keterlambatan merupakan tanggung jawab DPMPTSP, meskipun sebagian proses berada pada kewenangan perangkat daerah lain.

Hal kritis berikutnya koordinasi dan integrasi antarperangkat daerah. Pelayanan perizinan pada dasarnya merupakan proses lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai dengan jenis kegiatan atau usaha yang diajukan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan DPMPTSP tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan, ketepatan, dan responsivitas perangkat daerah teknis dalam memberikan rekomendasi, verifikasi lapangan, maupun pertimbangan teknis. Apabila koordinasi belum berjalan optimal, maka dapat terjadi proses berulang, ketidakjelasan status permohonan, dan memakan waktu tunggu lama bagi masyarakat.

Pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat juga menjadi aspek kritis dalam mengukur tingkat pelayanan. Pengaduan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian keluhan, tetapi sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi titik lemah pelayanan. Data pengaduan perlu dianalisis secara berkala untuk mengetahui jenis permasalahan yang paling sering muncul, perangkat daerah yang terlibat, waktu penyelesaian, serta tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pengaduan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai satu kesatuan sistem operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Strategi yang dirumuskan ditentukan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta mendukung peningkatan iklim investasi daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33

Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi serta hasil beberapa kajian dan masukan dari seluruh stakeholder, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Investasi

Kabupaten Bekasi, dengan lokasinya yang strategis dan potensi ekonomi yang besar, seharusnya dapat menjadi magnet bagi investasi baik domestik maupun asing. Namun, kenyataannya, peningkatan nilai investasi di wilayah ini masih belum optimal. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah ketidaksempurnaan infrastruktur. Meskipun Kabupaten Bekasi terletak di kawasan industri yang berkembang pesat, terutama di wilayah industri besar seperti Cikarang, infrastruktur transportasi, logistik, dan konektivitas digital masih belum memadai. Hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan distribusi barang yang tidak efisien, yang pada gilirannya mengurangi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Selain itu, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala besar.

Selain itu, proses perizinan yang lambat dan birokrasi yang rumit masih menjadi salah satu hambatan utama bagi calon investor. Meskipun DPMPTSP telah berusaha untuk menyederhanakan proses tersebut, namun masih ada kekurangan dalam hal transparansi, keterpaduan antar lembaga, dan kejelasan prosedur. Regulasi yang tidak mendukung dan sering berubah-ubah juga menambah ketidakpastian bagi dunia usaha, sehingga membuat calon investor enggan berkomitmen jangka panjang di Kabupaten Bekasi. DPMPTSP Kabupaten Bekasi memiliki peran penting dalam mempercepat pemecahan masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi, yaitu mempercepat proses perizinan, menyederhanakan prosedur yang ada, dan meningkatkan keterpaduan antar instansi terkait. Di samping itu, peningkatan kualitas infrastruktur—terutama yang berkaitan dengan transportasi, fasilitas umum, dan konektivitas digital—merupakan langkah penting yang harus dikejar agar Kabupaten Bekasi lebih terhubung dengan pasar global dan dalam negeri. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih fokus pada kebutuhan industri di wilayah Bekasi harus segera dijalankan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.

Sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investor, DPMPTSP juga harus mengoptimalkan promosi potensi daerah, baik melalui event internasional, digitalisasi informasi, maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat mengatasi berbagai kendala yang ada, menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dan akhirnya meningkatkan nilai investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi** serta hasil beberapa kajian dan masukan dari seluruh stakeholder, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Belum lengkapnya data dari 11 Industri Kawasan Investment Project Ready to Offer (IPRO)

Salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mendorong peningkatan investasi adalah melalui penyusunan *Investment Project Ready to Offer (IPRO)*, yaitu dokumen proyek-proyek investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada calon investor, baik dalam maupun luar negeri. Namun, hingga saat ini, data dan informasi dari 11 kawasan industri yang menjadi bagian dari IPRO Kabupaten Bekasi belum terkumpul secara lengkap dan sistematis.

2. Pelayanan Publik Belum Optimal

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga saat ini, pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi dinilai masih belum optimal, baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kemudahan akses, maupun kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

Permasalahan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain masih terbatasnya integrasi sistem perizinan berbasis elektronik (OSS-RBA) dengan layanan di tingkat daerah, kapasitas dan kompetensi SDM pelayanan yang belum merata, serta infrastruktur pendukung layanan yang belum memadai di seluruh unit kerja. Selain itu, proses pelayanan yang masih bersifat sektoral dan kurang sinergis dengan OPD teknis lainnya menyebabkan terjadinya hambatan birokrasi dan ketidaksesuaian waktu layanan dengan ekspektasi pemohon.

Dampak dari pelayanan publik yang belum optimal ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pelayanan pemerintah daerah, munculnya keluhan dan potensi administrasi, serta lambatnya proses investasi yang seharusnya dapat dikawal lebih cepat dan tepat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya strategis yang meliputi penguatan kapasitas SDM pelayanan, percepatan digitalisasi perizinan, pembenahan standar pelayanan publik (SPP), serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan pengguna layanan. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi lintas OPD dan percepatan integrasi layanan daerah dengan sistem nasional, agar tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

- a. Transformasi digitalisasi pelayanan publik yang belum optimal.**
- b. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP).**

3. *Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Bidang Penanaman Modal*

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai merupakan kunci utama dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang prima, serta promosi penanaman modal yang efektif dan berdaya saing. Namun demikian, hingga saat ini, kualitas dan kuantitas SDM pada bidang penanaman modal di lingkungan DPMPSTSP Kabupaten Bekasi masih belum optimal.

Secara kualitas, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman regulasi terbaru terkait investasi, penggunaan sistem layanan digital seperti OSS-RBA, serta kemampuan teknis dalam menyusun profil investasi yang layak tawar (*bankable*). Di sisi lain, secara kuantitas, jumlah personel yang menangani urusan penanaman modal masih belum sebanding dengan kompleksitas dan volume pekerjaan, terutama dalam pelayanan investor, pengawasan realisasi investasi, penyusunan data IPRO, serta fasilitasi proyek strategis daerah.

Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya layanan konsultasi dan fasilitasi kepada investor, keterlambatan dalam pembaruan data penanaman modal, serta rendahnya kualitas promosi investasi yang berbasis sektor unggulan daerah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian hambatan investasi juga menjadi tidak efektif karena keterbatasan SDM pengampu yang dapat menjadi penghubung (*liaison officer*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan dari instansi terkait seperti BKPM. Di sisi lain, perlu dilakukan evaluasi dan penataan organisasi guna menyesuaikan kebutuhan personel dengan beban kerja dan tuntutan reformasi pelayanan publik. Dengan penguatan SDM bidang penanaman modal, DPMPSTSP Kabupaten Bekasi akan mampu menjalankan fungsi promosi, pelayanan, dan pengawasan investasi secara lebih optimal dan profesional.

a. *Kurang Promosi Penanaman Modal.*

b. *Kurang SDM Pengendalian Penanaman Modal.*

4. *Belum Sempurnanya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan*

Permasalahan penting yang masih dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Bekasi adalah belum sempurnanya regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Ketiadaan atau belum lengkapnya landasan hukum yang kuat dan adaptif terhadap dinamika regulasi nasional, khususnya dalam kerangka reformasi pelayanan publik dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), menghambat optimalisasi peran DPMPSTSP dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Hingga saat ini, beberapa substansi pengaturan dalam Perda masih bersifat parsial, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, dan belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan lintas sektor yang terintegrasi. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan belum terdefinisinya dengan jelas mekanisme koordinasi antara DPMPSTSP dengan perangkat daerah teknis, khususnya dalam pengawasan, penerbitan rekomendasi teknis, dan tindak lanjut pengaduan.

Kondisi ini berdampak pada ketidakkonsistenan prosedur pelayanan, kelemahan dalam penegakan kepatuhan perizinan, serta rendahnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, tidak adanya kepastian hukum yang jelas juga menyulitkan DPMPSTSP dalam mengembangkan inovasi pelayanan perizinan digital dan non-perizinan berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara komprehensif, adaptif terhadap sistem OSS-RBA, serta responsif terhadap kebutuhan investasi daerah dan pelayanan publik, menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bekasi.

Pencapaian Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029, yaitu *"Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuju Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera"*. Secara spesifik, keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjang pencapaian **Misi** *"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Menciptakan Iklim Investasi dan Komunikasi"*. Melalui peningkatan menciptakan iklim investasi dan komunikasi , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan investor yang juga berdampak pada pencapaian agenda nasional dan internasional, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengampu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1), urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Selanjutnya disajikan dalam tabel evaluasi sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

TABEL 2.3 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

NO	JENIS PELAYANAN	KODE APLIKASIE-SPM	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	JUMLAH WARGA MEGARA BERHAK MENERIMALAYANAN DASAR	TARGET JUMLAH WARGANEGARAYANG MENJADI PRIORITAS
NIHIL						

Sumber : DPMPTSP, 2026

DPMPTSP Kabupaten Bekasi mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang setara, inklusif, responsif gender, non diskriminatif, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan, peningkatan kapasitas aparatur, penggunaan data dan informasi yang relevan dalam perencanaan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan. Dalam pengelolaan risiko, DPMPTSP Kabupaten Bekasi melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, monitoring, dan evaluasi risiko pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebagai upaya memastikan tercapainya sasaran organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tantangan dan Peluang Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan, Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih, dan Permasalahan Perizinan. Akar dari permasalahan ini Standar Pelayanan, Pengendalian waktu proses dan mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga memengaruhi kualitas dan kepastian layanan, Ketidakpastian regulasi perizinan, dan Kurangnya pemahaman atau kesengajaan pelanggaran masyarakat. Maka dari itu

memperbaiki semuanya harus lebih ditingkatkan kembali Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Perizinan.

Aspek Strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Jumlah SDM yang memadai;
4. Tersedianya anggaran yang memadai; dan
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Adapun faktor pendorong untuk capaian keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tatakelola Pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan SAKIP secara lebih komprehensif diseluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor Pendukung

- Regulasi dan Komitmen Pimpinan: Adanya Rencana Strategis (Renstra) dan dukungan regulasi daerah yang menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan Tupoksi.
- Inovasi dan Digitalisasi: Penggunaan sistem informasi perizinan yang terintegrasi (seperti Online Single Submission/OSS) mempercepat proses dan membuat pelacakan data (tracking) kinerja lebih akurat.
- Sumber Daya Manusia: Ketersediaan aparatur dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan kualifikasi memadai untuk menjalankan fungsi teknis.

Faktor Penghambat

- Ketergantungan Tim Teknis Antar Dinas: Penyelesaian proses perizinan tertentu sering kali terhambat estimasi waktu yang tidak pasti dari tim teknis yang berada di Perangkat Daerah (PD) lain.
- Aspek Moral dan Budaya Kerja: Masih adanya pemahaman pegawai mengenai pelaporan gratifikasi dan benturan kepentingan (konflik kepentingan) yang perlu terus disosialisasikan secara intensif.
- Fluktuasi Beban Kerja: Tingginya volume permohonan investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi terkadang tidak sebanding dengan kecepatan respon lintas sektoral.

Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Penyelarasan Indikator Kinerja: Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang spesifik, terukur, dan selaras dengan target RPJMD dan RPJPD.
- Peningkatan Pengawasan: Memperkuat pengawasan internal terkait potensi benturan kepentingan, gratifikasi, serta memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor: Mengadakan rapat koordinasi berkala dengan dinas teknis terkait (seperti Dinas PUPR atau Dinas Lingkungan Hidup) untuk mengatasi hambatan birokrasi dan lamanya waktu penerbitan izin.

Fokus pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Menjadikan IKM sebagai tolok ukur utama evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Review dilakukan untuk menilai kesesuaian antara program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP dengan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui review ini, dilakukan pemetaan kebutuhan, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan anggaran yang diperlukan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal. Hasil review diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan perencanaan agar program dan kegiatan DPMPTSP lebih terarah, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan anggaran yang dialokasikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagaimana berikut:

TABEL 2. 4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN KABUPATEN BEKASI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	1 Dokumen		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	1 Dokumen		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen		
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		Perda sudah diterbitkan pada tahun 2024 dan Draft Perbub sudah dibuat tahun 2026 (dalam proses penandatanganan)
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA/PMDN) Dengan UMKM Didaerah	1 Dokumen		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA/PMDN) Dengan UMKM Didaerah	1 Dokumen		Kemitraan Antara Usaha Besar (PMA/PMDN) Dengan UMKM dilaksanakan secara daring
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Terlaksanannya Pembuatan Peta Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Terlaksanannya Pembuatan Peta Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen		
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kabupaten Bekasi	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR	1 Dokumen		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kabupaten Bekasi	Jumlah Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR	1 Dokumen		Masih kurangnya data pendukung sektoral

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Dilaksanakan pada tahun 2026
	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Semula akan membuat IPRO Kawasan Industri, saat ini hanya untuk membuat peta potensi investasi Kecamatan
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	1 Dokumen		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	1 Dokumen		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen hasil laporan penyelenggaraan promosi dan dokumen strategi promosi penanaman modal	1 Dokumen		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen hasil laporan penyelenggaraan promosi dan dokumen strategi promosi penanaman modal	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kegiatan promosi investasi rencananya hanya akan mengikuti event di wilayah Jawa Barat
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen dalam Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen dalam Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Strategi promosi investasi berupa buku buletin penanaman modal
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha	340 Pelaku Usaha		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha	340 Pelaku Usaha		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku usaha yang terlayani perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	340 Pelaku Usaha		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku usaha yang terlayani perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	340 Pelaku Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	340 Pelaku Usaha		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	340 Pelaku Usaha		Coaching perijian PBG dab PKKPR di 3 kec, review SOP,Pendampingan penerbitan NIB dan sertifikat halal di desa2, coaching penerbitan SIP ke puskesmas2
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Resiko Terintegrasi Secara elektronik	10 Pelaku Usaha		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Resiko Terintegrasi Secara elektronik	10 Pelaku Usaha		Coaching perizinan di 10 kawasan industri
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Laporan		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Laporan		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman Modal	3 laporan		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman Modal	3 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	240 Pelaku Usaha		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Bekasi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	240 Pelaku Usaha		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dilaksanakan secara daring
	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil, Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha		Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Bekasi	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil, Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha		Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan oleh OPD Teknis masing-masing
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha		Hanya menganggarkan belanja makanan dan minuman rapat
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen hasil pengolahan data dan informasi perizinan dan non Perizinan	1 Dokumen		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bekasi	Jumlah dokumen hasil pengolahan data dan informasi perizinan dan non Perizinan	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bekasi	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bekasi	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		Dilaksanakan ditahun 2027, rencana akan mengadakan sosialisasi perizinan di kawasan-kawasan wilayah kabupaten bekasi, pelaksanaan Triwulan III
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bekasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah_Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 Dokumen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bekasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah_Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 Dokumen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	9 Dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	9 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya laporan keuangan Perangkat daerah	3 Dokumen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya laporan keuangan Perangkat daerah	3 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bekasi	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	91 Orang/Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bekasi	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	91 Orang/Bulan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bekasi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	91 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bekasi	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	91 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah selama 12 Bulan	3 Jenis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah selama 12 Bulan	3 Jenis		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	44 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	44 Paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	34 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	34 Paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	8 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	8 Paket		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun	12 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun	12 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	8 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	8 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun	2 Jenis		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bekasi	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan dalam satu tahun	2 Jenis		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah selama 12 Bulan	84 Unit		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bekasi	Tersediannya layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah selama 12 Bulan	84 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	14 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	14 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	70 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bekasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	70 Unit		
TOTAL											

Sumber : DPMPTSP, 2026

Berdasarkan hasil review rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2027 sesuai Tabel 2.4. diatas, dapat disampaikan bahwa Rancangan Renja Tahun 2027 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan untuk penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Pada rancangan awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027, pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.29.606.451.730,-. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.262.271.270,-, sehingga total pagu anggaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 menjadi Rp.25.344.180.460,-. Beberapa belanja yang diefisiensi adalah belanja sewa ruang pertemuan, makan dan minum rapat yang bersifat internal, perjalanan dinas keluar daerah, bimbingan teknis yang diselenggarakan di luar daerah, dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan. Belanja yang direncanakan merupakan belanja yang difokuskan untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bekasi. Maka efisiensi ini tidak akan mengurangi kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu capai pada Tahun 2027, karena hal ini telah dilakukan pula pada tahun 2026.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun Anggaran 2027, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.5, Sebagai Berikut:

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN
2027 KABUPATEN BEKASI

No	Program/Kegatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

Sumber : DPMPTSP, 2026

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran didasarkan pada hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP. Selanjutnya, bab ini juga memuat rumusan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta kebijakan pembangunan daerah. Arah pembangunan nasional 2025–2029 tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Asta Cita, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air; serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar-umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian, Bab III diharapkan dapat menjadi landasan operasional dalam mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang efektif, efisien, dan berdaya saing, sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bekasi.

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PRO-SN) Tahun 2027

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan serta capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dengan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kewenangannya di tingkat pusat, serta Renstra perangkat daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting daerah. Sinkronisasi ini dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, sekaligus responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik pelayanan perizinan serta penanaman modal di Kabupaten Bekasi.

Kesesuaian capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi dengan kementerian dan perangkat daerah terkait, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan perizinan, percepatan proses perizinan berusaha, serta fasilitasi penanaman modal, diharapkan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berjenjang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap menyesuaikan target kinerja dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, sumber daya yang tersedia, tingkat pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, serta dinamika investasi yang berkembang di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan penanaman modal yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi eksisting Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Program Strategis Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terdapat pada usulan yang ditujukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban berdasarkan Berita Acara Rekorterkrenbang PRO-SN, dapat dilihat melalui Tabel 3.1 sebagai berikut:

TABEL 3.1 DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PRO-SN) TAHUN 2027										
NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/KEGIATAN PROSN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIHIL										

Sumber : DPMPTSP, 2026

3.1.2 Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Untuk mengoptimalkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang memiliki kewenangan di tingkat pusat, serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Sinkronisasi tersebut bertujuan agar capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi dapat memberikan kontribusi secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Kesesuaian antara capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi dengan kementerian terkait, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, diharapkan dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara selaras di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan target kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal agar sejalan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kementerian terkait, guna mendorong peningkatan iklim investasi serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dapat dilihat melalui Tabel 3.2 Sebagai Berikut:

TABEL 3.2 DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang tidak Eksploitatif	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Menyelesaikan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	4	
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan Usaha	240	
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha	70	
		Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2027								
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penanaman Modal		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pelayanan Perizinan	Kegiatan Usaha	340 Pelaku Usaha	

Sumber : DPMPTSP, 2026

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029). Tahap Pertama merupakan Tahap Penguatan Pondasi Transformasi modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi secara umum berdasarkan kerangka kerja Pentahapan Pencapaian Misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Penguatan fondasi pelayanan dasar kesehatan, akselerasi pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Penguatan ekonomi unggulan daerah, Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja yang Kompeten;
3. Peningkatan Tata kelola yang adaptif dan birokrasi yang berkualitas;
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, pemahaman wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban Masyarakat;
5. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Penyediaan dan peningkatan cakupan layanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata;
8. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Berkesinambungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2027 disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	
			2025	2026	2027		2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan : Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Kontribusi PDRB Kab/Kota	14,90%	14,90%	14,90%	14,71%	-	-	-
2	Sasaran : Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif	Presentase Peningkatan Investasi	5,44%	5,44%	5,44%	13,94%	5,44%	5,44%	Selama kurun waktu 2021-2025 realisasi investasi mengalami peningkatan tetapi untuk pertumbuhan investasinya mengalami penurunan

Sumber : DPMPTSP, 2026

Berdasarkan tabel di atas, Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan pencapaian target Renstra, Realisasi Kinerja

yang telah dicapai, serta proyeksi capaian pada tahun berjalan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai kapasitas organisasi dan kemampuan pendanaan, sekaligus tetap mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan sasaran pembangunan Kabupaten Bekasi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bekasi tahun 2025-2029. Jika dalam pelaksanaannya, menunjukkan capaian yang melebihi maupun memenuhi target, maka kondisi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2027 guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berpedoman pada Perda RPJMD Kabupaten Bekasi Nomor 4 tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan didukung oleh aparatur yang profesional dan berkualitas, DPMPTSP Kabupaten Bekasi diharapkan menjadi perangkat daerah yang andal dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, disusun program dan kegiatan sebagai langkah pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program dan kegiatan dimaksud disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bekasi 2025-2029 sebagaimana tabel 3.4 berikut:

TABEL 3.4 DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program Kemudahan akses dan ruang investasi menuju penciptaan iklim usaha dan iklim investasi kondusif	Program pengembangan iklimpenanaman modal	Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Dokumen	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	
				Jumlah dokumen Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	Dokumen	1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
				-	-	-	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-
				-	-	-	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-

NO	SASARAN PEMBANGU NAN	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				-	-	-	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
				-	-	-	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-
				-	-	-	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
				-	-	-	Kemitraan Usaha Nasional	-	-	-	-	-
				-	-	-	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	Dokumen	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
								Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	
			Program pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha	Pelaku Usaha	340	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Pelayanan Perizinan	Kegiatan Usaha	340 Pelaku Usaha	
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Laporan	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumah Peny Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dlm merealisasikan Kegiatan Usahanya	Laporan	1	

NO	SASARAN PEMBANGUNAN	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	

Sumber : DPMPTSP, 2026

Pada Anggaran Tahun 2027, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memiliki 6 Program, 13 Kegiatan, dan 34 Subkegiatan, disusun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2027 disajikan dalam table 3.5 sebagai berikut:

TABEL 3.5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028 KABUPATEN BEKASI

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIO NAL	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
	2					URUSANPEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	2.18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
1.	2.18.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA															
						Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah															
							999.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88.24 Poin		84.61 Poin	85.26 Poin								86.10 Poin		
	2.18.01.2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-						
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen								6 Dokumen		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan								3 Laporan		
	2.18.01.2.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								-	-	-					
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Bekasi	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					6 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00			-	-	-				
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												-			
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah												-			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00							1 Laporan		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00							18 Laporan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan		91 Orang/bulan	91 Orang/bulan								91 Orang/bulan		
	2.18.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									-	-	-				
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan		91 Orang/bulan	91 Orang/bulan		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					91 Orang/bulan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIO NAL	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1								
	2.18.01.2.02.0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00			-	-	-				
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					1 Laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu	
	2.18.01.2.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00			-	-	-				
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00	Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					18 Laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF	
															NASIO NAL		PROVI NSI				DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-				
						Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						0,00					-				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang		91 Orang	91 Orang	0,00							91 Orang		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00							1 Paket		
	2.18.01.2.05.0002					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00			-	-	-				
						Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					1 Paket		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.05.0011					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00			-	-	-				
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang		91 Orang	0 Orang	0,00	Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					91 Orang		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIO NAL	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah											-				
						Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah											-				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen			
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00							12 Laporan			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan			
							8 Paket		8 Paket	8 Paket								8 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket								12 Paket			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket								44 Paket			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket		34 Paket	34 Paket								34 Paket			
	2.18.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-	-	-							
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					44 Paket		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIO NAL	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								-	-	-					
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		34 Paket		34 Paket	34 Paket		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					34 Paket		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-	-	-					
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					8 Paket		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-	-	-					
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					12 Paket		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													atan Cikarang Pusat Desa Sukmahi 1								
	2.18.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00			-	-	-				
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kab. Bekasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									-	-	-				
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukmahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.06.0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									-	-	-				
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIO NAL	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													ahi 1								
	2.18.01.2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											-				
						Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi											-				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit								4 Unit		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit								8 Unit		
	2.18.01.2.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	-	-					
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					4 Unit		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
	2.18.01.2.07.0011					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	-	-					
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					8 Unit		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											-				
						Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Air, Listrik dan Komunikasi Terpenuhi											-				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan								12 Laporan		
	2.18.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-	-	-					
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	-	-					
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											-				
						Barang Milik Daerah Berfungsi Baik											-				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	16 Unit		14 Unit	14 Unit								16 Unit		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
							Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit								70 Unit		
	2.18.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-	-	-					
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		16 Unit		14 Unit	14 Unit		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	-	-					
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit		70 Unit	70 Unit		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Unit		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	2.18.02					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															
						Meningkatnya kemudahan berinvestasi															
							999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase								100 Persentase		
	2.18.02.2.01					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang											-				

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
						Kebijakan Insentif Penanaman Modal Diterapkan											-				
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen		
	2.18.02.2.01.0001					Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					0,00			-	-	-					
						Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01.0003					Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota								-	-	-					
						Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.02.2.02					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											-				
						Meningkatnya Pemanfaatan Peta Potensi Investasi											-				
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah		1 Daerah	1 Daerah	0,00							1 Daerah		
	2.18.02.2.02.0003					Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						0,00			-	-	-				
						Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan		1 Daerah		1 Daerah	0 Daerah	0,00	Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Meningkatnya Pemanfaatan Peta Potensi Investasi											-				
							Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-							-			
							Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-			
	2.18.02.2.02.0006					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	-				
						Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.02.2.02.0007					Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota								-	-	-					
						Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	2.18.03					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
						Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal															
							999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5.00 Persentase		5.00 Persentase	5.00 Persentase							5.00 Persentase			
	2.18.03.2.01					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											-				
						Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Investasi											-				
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen			
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen			
	2.18.03.2.01.0002					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								-	-	-					
						Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													Desa Sukamahi 1								
	2.18.03.2.01.0003					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								-	-	-					
						Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	2.18.04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
						Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko															
							999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase								100 Persentase		
	2.18.04.2.01					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											-				
						Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Memenuhi Standart											-				
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00							10 Pelaku Usaha		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	340 Pelaku Usaha		340 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha								340 Pelaku Usaha		

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.04.2.01.0005					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						0,00			-	-	-				
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0006					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									-	-	-				
						Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	340 Pelaku Usaha		340 Pelaku Usaha	340 Pelaku Usaha		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					340 Pelaku Usaha		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						0,00			-	-	-				
						Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Pelaku Usaha		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	PROVINSI					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
												ng Pusat Desa Sukamahi 1									
5.	2.18.05					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL															
						<i>Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal</i>															
							999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase							100 Persentase			
	2.18.05.2.01					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											-				
						Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal Yang Dihadapi Pelaku Usaha											-				
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha		70 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha							70 Kegiatan Usaha			
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha		240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha							240 Pelaku Usaha			
	2.18.05.2.01.0005					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								-	-	-					
						Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	240 Pelaku Usaha		240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				240 Pelaku Usaha		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKAS I	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIO NAL	PROVI NSI					DAERA H
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													ahi 1								
	2.18.05.2.01.0006					Pengawasan Penanaman Modal								-	-	-					
						Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha		70 Kegiatan Usaha		70 Kegiatan Usaha	70 Kegiatan Usaha		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					70 Kegiatan Usaha		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
						Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal Yang Dihadapi Pelaku Usaha											-				
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-								-		
	2.18.05.2.01.0007					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya								-	-	-					
						Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	4 Kegiatan Usaha		Provin si Jawa Barat Kab. Bekasi Kecam atan Cikara ng Pusat Desa Sukam ahi 1	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu
6.	2.18.06					PROGRAMPENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL														0,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAA N 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal														0,00	
							999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase								100 Persentase	0,00	
	2.18.06.2.01					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											-			0,00	
						Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Penanaman Modal											-			0,00	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen		6 Dokumen	10 Dokumen								10 Dokumen	0,00	
	2.18.06.2.01.0002					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								-	-	-				0,00	
						Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen		Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat Desa Sukamahi 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	JUMLAH																				

Sumber: DPMPTSP, 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat uraian mengenai perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi sebagai penjabaran operasional dari kebijakan, tujuan, dan sasaran perangkat daerah. Bab ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DPMPTSP dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan arah pembangunan daerah, kebutuhan pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta kemampuan pendanaan daerah.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja sasaran, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta masukan dari pemangku kepentingan. Selain itu, perumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan hasil Musrembang, pokok-pokok pikiran DPRD, kebijakan nasional dan provinsi, serta keseusian dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPD dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Bab ini juga menyajikan rekapitulasi jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi, sebagai gambaran keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rekapitulasi tersebut dilengkapi dengan sebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat maupun kegiatan pendukung internal perangkat daerah, sehingga dapat menunjukkan jangkauan dan fokus pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya, Bab IV memuat Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan yang merinci indikator kinerja, target capaian, lokasi, pagu indikatif, serta sumber pendanaan. Tabel ini menjadi alat kendali dalam pelaksanaan dan penganggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2027

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
			999.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		85.26 Poin			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan			
	2.18.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen			
	2.18.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat,			APBD	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		SKPD		Sukama hi.				
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan			
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		18 Laporan			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		91 Orang/bulan			
	2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		91 Orang/bulan			
	2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan			
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		91 Orang			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket			
	2.18.01.2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0 Orang			
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 Paket			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		44 Paket			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		34 Paket			
	2.18.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		44 Paket			
	2.18.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		34 Paket			
	2.18.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 Paket			
	2.18.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket			
	2.18.01.2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan			
	2.18.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen			
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi						
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit			
	2.18.01.2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit			
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Air, Listrik dan Komunikasi Terpenuhi						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan			
	2.18.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan			
	2.18.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Barang Milik Daerah Berfungsi Baik						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14 Unit			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit			
	2.18.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14 Unit			
	2.18.01.2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit			
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
		<i>Meningkatnya kemudahan berinvestasi</i>						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			999.RealisasiTotal terhadap Target Investasi		100 Persentas e			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/InsentifDibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
		Kebijakan Insentif Penanaman Modal Diterapkan						
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		1 Dokumen			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.02.2.01.001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0 Dokumen			
	2.18.02.2.01.003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		1 Dokumen			
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						Kegiatan yang mendukung strategi LKIP tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Pemanfaatan Peta Potensi Investasi						
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		1 Daerah			
	2.18.02.2.02.003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		0 Daerah			
		Meningkatnya Pemanfaatan Peta Potensi Investasi						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota		-			
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota		-			
	2.18.02.2.02.0 006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen			
	2.18.02.2.02.0 007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.				

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen			
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
		<i>Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal</i>						
			999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		5.00 Persentase			
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Investasi						
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen			
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen			
	2.18.03.2.01.0 002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.03.2.01.003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen			
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
		<i>Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko</i>						
			999. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		100 Persentase			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Memenuhi Standart						
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen			
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		10Pelaku Usaha			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		340 Pelaku Usaha			
	2.18.04.2.01.0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen			
	2.18.04.2.01.0 006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		340 Pelaku Usaha			
	2.18.04.2.01.007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		10 Pelaku Usaha			
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<i>Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal</i>						
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahandan Hambatan yang DihadapiPelaku Usaha dalam Membuka Usaha		100 Persentas e			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
		Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal Yang Dihadapi Pelaku Usaha						
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profildan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan		70 Kegiatan Usaha			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		240 Pelaku Usaha			
	2.18.05.2.01.0 005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis		240 Pelaku Usaha			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Risiko					
	2.18.05.2.01.006	Pengawasan Penanaman Modal		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		70 Kegiatan Usaha			
		Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal Yang Dihadapi Pelaku Usaha						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		-			
	2.18.05.2.01.0 007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		4 Kegiatan Usaha			
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
		<i>Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal</i>						

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		100 Persentas e			
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Penanaman Modal						
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		10 Dokumen			
	2.18.06.2.01.0 002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berdasarkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi.			APBD	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 Dokumen			
	JUMLAH							

4.2 DAFTAR HIBAH DAN BANSOS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Daftar Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** kepada pihak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Hibah** diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan. Hibah bersifat **tidak wajib, tidak mengikat, dan pada prinsipnya tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran**, serta ditujukan untuk menunjang pencapaian program, pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan daerah. Sedangkan bantuan sosial pemberian bantuan berupa **uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat** yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif, terutama untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Adapun daftar hibah dan bantuan sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2027 disajikan pada tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2 DAFTAR HIBAH DAN BANSOS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OBJEK HIBAH/BANSOS (UANG/BARANG/JASA)	URAIAN HIBAH/BANSOS	PENGUSUL/PENERIMA
1	2	3	4	5	6	7
NIHIL						

Pada tahun 2027, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tidak mengalokasikan anggaran untuk dana hibah ataupun bantuan sosial (Bansos) dalam rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Hal ini sejalan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tidak memiliki program dan kegiatan yang memuat Hibah dan Bantuan Sosial. Dengan demikian daftar hibah dan bansos perangkat daerah dinyatakan Nihil.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya didasarkan pada usulan dari bidang-bidang dan bagian di lingkungan DPMPTSP. Program dan Kegiatan serta pendanaan yang tercantum dalam Renja DPMPTSP merupakan indikasi yang hendak dicapai pada Tahun 2027 dan bersifat indikatif. Renja DPMPTSP Tahun 2027 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029, Renstra DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 dan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2027. Keputusan Kepala DPMPTSP Tentang Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2027 selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPMPTSP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-DPMPTSP) sebagai bahan awal penyusunan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027 dan menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2027.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik serta program dan kegiatan DPMPTSP pada Tahun 2027, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Bekasi Tahun 2027 sebagai berikut:

- Dalam upaya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha;
- Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;
- Dalam upaya peningkatan tindak lanjut permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh masyarakat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Dalam rangka mewujudkan sasaran DPMPTSP Kabupaten Bekasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan public yang prima dan peningkatan realisasi investasi, diperlukan koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan pelaku usaha
- Dalam menetapkan dokumen harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Bekasi, 7 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi


Drs. H. JAQHARUL ALAM, ME

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19681103-199003 1 003